



## KPU Dideadline 10 Hari untuk Lengkapi Temuan BPK Rp 334 M

**JAKARTA**-Komisi II DPR RI memberikan waktu 10 hari kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melengkapi dan mengklarifikasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, berdasarkan audit, terdapat penyimpangan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2013-2014 sebesar Rp 334 miliar.

Batas waktu yang diberikan kepada KPU tersebut berdasarkan hasil kesepakatan antara Komisi II DPR RI dan KPU pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/6).

"Pertama, terkait hasil PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, red) yang dilakukan BPK pada KPU atas anggaran Pemilu tahun 2013-2014, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan seluruh jajarannya segera melengkapi laporan tindak lanjut setiap permasalahan yang menjadi temuan BPK," ungkap Rambe Kamarulzaman, Ketua Komisi II DPR RI kepada pers, Selasa (23/6).

Sesuai rekomendasi BPK, sambung politisi Partai Golkar itu, secara rinci dan dengan keterangan sebagaimana yang telah disampaikan bila terdapat temuan penyimpangan Rp 334 miliar. "Jadi KPU harus melakukan klarifikasi kelengkapannya kepada BPK dengan bukti tindak lanjut dari BPK paling lambat 10 hari," tukasnya.

Kedua, menurut Rambe, guna mendukung kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta dengan mempertimbangkan struktur KPU yang bersifat hirarkis hal itu wajib dilakukannya. "Komisi II DPR RI meminta KPU untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya," ujarnya.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, 10 hari mendatang pi-

haknya siap untuk menyampaikan hasil pertanggungjawaban atas hasil temuan BPK. Hingga kini, perkembangan atas temuan tersebut masih berkisar 75 persen.

"Sudah 75 persen yang sudah ditindak lanjuti. Setiap minggunya ada perkembangan kadang-kadang ada perubahan sampai dua digit kadang satu digit. Kalau sampai 10 hari itu sampai 80 persen kami akan menyampaikan 80 persen disampaikan 20 persen lagi di mana saja," pungkasnya.

Husni juga mengaku, permintaan Komisi II DPR RI untuk mengklarifikasi temuan BPK tersebut tidak berniat untuk mengganggu kinerja KPU. "Tidak ada niatan mengganggu. Ini tugas biasa, kami menyelesaikan pertanggungjawaban Pemilu 2014 lalu dan menindaklanjuti temuan BPK," imbuh Husni.

Disinggung kesan dari Komisi II DPR RI seperti mencari-cari kesalahan dari KPU? Husni mengungkapkan, pihaknya menyambut positif atas klarifikasi temuan BPK tersebut. "Tidak ada, kesan kita baik, semua positif," ucap Husni dengan senyuan sedikit getir.

"Saya mengingatkan KPU pusat untuk berkoordinasi dengan KPU provinsi, kabupaten/kota, untuk tetap bersama-sama menyiapkan pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang," sarannya.

Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU di Komplek Parlemen, Senayan, berlangsung alot. Pasalnya, agenda awal membahas evaluasi soal Peraturan KPU (PKPU) diblokkan menjadi penjelasan KPU soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan Rp 334 miliar. KPU pun mengaku merasa dijebak oleh para anggota legislatif di Senayan. (aen)